

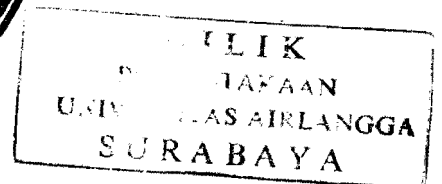
SKRIPSI

ROEDY ANDRIANTO

STUDI PERBANDINGAN PENYUSUTAN FISKAL ATAS AKTIVA TETAP DARI HASIL PERHITUNGAN AKUNTAN PUBLIK DENGAN PERHITUNGAN WAJIB PAJAK



KK
A. 2143/96
And.
A.



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

**STUDI PERBANDINGAN PENYUSUTAN FISKAL
ATAS AKTIVA TETAP DARI HASIL PERHITUNGAN
AKUNTAN PUBLIK DENGAN PERHITUNGAN WAJIB PAJAK**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

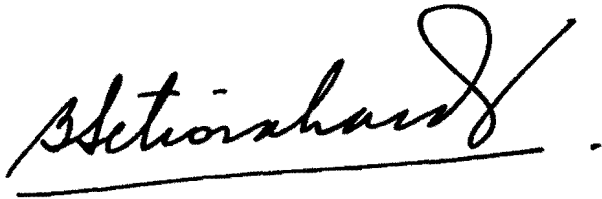
**DIAJUKAN OLEH
ROEDY ANDRIANTO
No. Pokok : 049320008E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1996

Surabaya, 08-07-1996
Diterima dengan baik dan siap diuji.

Dosen Pembimbing,,

A handwritten signature in black ink, reading "Budi Setiorahardjo", is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, looping initial 'B' and a long, sweeping tail.

(Drs. Ec. BUDI SETIORAHARDJO, Ak.)

SKRIPSI

**STUDI PERBANDINGAN PENYUSUTAN FISKAL
ATAS AKTIVA TETAP DARI HASIL PERHITUNGAN AKUNTAN
PUBLIK DENGAN PERHITUNGAN WAJIB PAJAK**

DIAJUKAN OLEH :

ROEDY ANDRIANTO

No. Pokok : 049830008E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

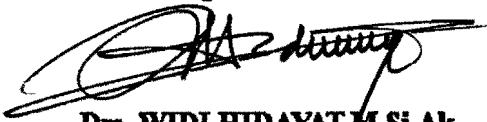
DOSEN PEMBIMBING



Drs. Ec. BUDI SETIORAHARDJO, Ak.

TANGGAL 18-9-96

Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. WIDI HIDAYAT, M.Si, Ak.
NIP. 131588573

TANGGAL 18-9-96

Abstraksi

Dalam mewujudkan pembangunan baik material maupun spiritual diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu bangsa Indonesia pada Pelita I sampai dengan Pelita III menitik beratkan sumber pembiayaan untuk pembangunan pada sektor minyak dan gas bumi.

Seiring dengan pesatnya pembangunan yang mana akan membutuhkan pula biaya yang besar, maka sumber pembiayaan dari minyak dan gas bumi dirasakan sudah tidak mencukupi lagi. Sektor perpajakan yang pada awal Pembangunan Jangka Panjang I kurang memegang peranan yang penting, mulai Pembangunan Jangka Panjang I Pelita IV dirasakan perlu untuk penunjang dana pembangunan dimana ditandai dengan pembaharuan sektor perpajakan dengan dikeluarkan Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Dalam praktek Wajib Pajak dapat menggunakan Laporan Keuangan yang disusun oleh pihak manajemen yang dipakai sebagai lampiran pada waktu pengisian SPT, disamping itu, adapula Wajib Pajak yang memanfaatkan jasa Akuntan Publik yang mempunyai divisi pajak untuk pengisian SPT beserta lampiran laporan keuangannya.

Penghitungan Pajak Penghasilan tidak terlepas dari penghitungan penyusutan fiskal. Oleh karena itu baik Wajib pajak sendiri maupun Akuntan Publik harus memahami perhitungan penyusutan fiskal, sehingga perhitungan penyusutan fiskal tersebut akan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan ternyata masih ada penyimpangan mengenai besarnya penyusutan fiskal antara Wajib Pajak dengan Fiskus dan antara penyusutan fiskal hasil perhitungan akuntan publik dengan fiskus. Hasil perhitungan fiskus didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban apakah hasil perhitungan penyusutan antara Wajib Pajak yang menggunakan jasa Akuntan Publik lebih kecil penyimpangannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk tujuan tersebut maka digunakan dasar-dasar teori Statistik yaitu dengan menggunakan uji beda dua rata-rata dan menggunakan test MANN-WHITNEY.

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa hasil perhitungan penyusutan fiskal Akuntan Publik lebih kecil penyimpangannya dibandingkan hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang mana dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan Akuntan Publik lebih mendekati kebenaran dibandingkan hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa akuntan publik.

Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar dari hasil penelitian tersebut yang mungkin dapat dilakukan dengan cara lebih mengintensifkan penyuluhan pajak, lebih mengintensifkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, atau pun untuk perusahaan-perusahaan yang masuk kategori tertentu hendaknya laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.